



Laporan Pemantauan TLRHP dan Kerugian Daerah Semester II 2016

Suriansyah: Keuangan Negara untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat



H. Suriansyah

PONTIANAK-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan menyampaikan laporan pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2016. Terhadap pimpinan DPRD serta pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (24/1).

"Laporan tersebut memuat mengenai bera-

pa potensi kerugian negara serta tindak lanjut rekomendasi BPK RI terhadap hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Nah, bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI tersebut apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Itulah yang dipantau kembali oleh BPK RI," ucap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, H. Suriansyah di ruang kerjanya, Selasa (24/1).

Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini menuturkan, banyak hal yang bisa terjadi terkait pengelolaan keuangan negara sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Misalnya, kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan administrasi maupun dikarenakan penyimpanan terhad-

apada aparat penegak hukum agar diproses lebih lanjut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku," ulasnya.

Menurutnya, kewenangan yang dimiliki BPK RI tersebut tentunya bertujuan untuk menekan atau mengurangi kerugian keuangan negara yang terjadi.

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar ini mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar dapat mengelola keuangan negara maupun aset-aset yang dimiliki daerah secara lebih baik lagi di masa mendatang.

"Karena keuangan negara seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Apabila pengelolaan keuangan negara semakin baik artinya kita harapkan kesejahteraan rakyat

akan meningkat," lugasnya.

Tak hanya itu, para pengguna anggaran maupun pihak-pihak yang mengelola keuangan negara tentu harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara proporsional dan profesional.

"Seharusnya tidak lagi ada kesalahan administrasi ataupun penyimpangan-penyimpangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Ke depan, kita harapkan pengelolaan uang negara oleh ASN harus lebih baik lagi," ucap H. Suriansyah.

Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe